

Pengembangan Wilayah

Tinjauan Umum

Isu-isu utama pembangunan daerah di Indonesia sampai sejauh ini antara lain penyebaran penduduk dari Jawa ke pulau-pulau lainnya selama tahun 1960-1980-an, pembangunan Indonesia Timur dan perbaikan kesenjangan wilayah pada era 1990-an serta peningkatan kapasitas pembangunan daerah seiring dengan desentralisasi sejak tahun 2000-an.

Sejak tahun 1970-an hingga 1990-an, JICA bekerjasama untuk menyiapkan Rencana Induk pembangunan daerah yang komprehensif serta membantu pengformulasian program pembangunan yang lintas sektor dan komprehensif yang mencerminkan karakteristik kewilayahan. Pendekatan ini telah mendorong perubahan paradigma pendekatan pembangunan daerah yang lebih lintas sektor, komprehensif dan berbasis kewilayahan.

Pada tahun 1990-an JICA mendukung pembangunan infrastruktur perdesaan lewat "Proyek Pengembangan Infrastruktur Daerah Perdesaan" yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurusi ketimpangan wilayah. Lalu pada pertengahan 1990-an, JICA melaksanakan "Proyek Penguatan Pembangunan Masyarakat Perdesaan Sulawesi untuk Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan" di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek ini mengembangkan Sistem Dukungan Pembangunan Pedesaan Partisipatif dalam mengimplementasikan berbagai proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pedesaan melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lokal lainnya seperti perguruan tinggi dan LSM. Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan peraturan daerah mengenai sistem dukungan ini dan hingga saat ini berbagai kegiatan telah berjalan dan dikembangkan, dengan mengikutsertakan berbagai penduduk lokal.

Seiring perkembangan desentralisasi, pada tahun 2000-an JICA mengimplementasikan "Proyek Pengembangan Kapasitas se-Sulawesi" untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, implementasi, monitoring serta umpan balik proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang dilaksanakan lewat kolaborasi berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan penguatan fungsi pemerintah daerah, JICA telah mendukung penguatan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah serta mendorong pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil

JICA telah mendukung upaya pembangunan daerah di Indonesia dalam dua bidang: 1) Pada era 1980-an dan 1990-an, JICA mendukung pengembangan Rencana Induk pembangunan daerah dengan titik berat pada pembangunan komprehensif yang berbasis kewilayahan.

2) Di tengah pesatnya perkembangan desentralisasi pada tahun 2000-an, JICA mendukung pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan berbasis masyarakat. Dukungan-dukungan tersebut mengarah pada hal berikut:

- Memperkenalkan pendekatan komprehensif dan lintas sektor yang berbasis kebutuhan kewilayahan dalam perencanaan pembangunan nasional.
- Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagai basis untuk mempromosikan inisiatif lokal dalam pembangunan wilayah.
- Kontribusi dalam membangun stabilitas nasional melalui pengurangan kesenjangan wilayah.



Proyek Pengembangan Kapasitas se-Sulawesi (2007- 2010)

Dengan menargetkan 29 kabupaten di enam provinsi di Sulawesi, Proyek Pengembangan Kapasitas se-Sulawesi mempromosikan inisiatif masyarakat dalam memecahkan masalah mereka serta mengembangkan sistem dimana pemerintah daerah bisa mendukung inisiatif tersebut secara memadai. Untuk mencapai hal tersebut, proyek menyediakan pelatihan untuk staf pemencana di tingkat provinsi dan kabupaten serta untuk "fasilitator masyarakat" yang umumnya diseleksi dari anggota LSM. Kemudian proyek memfasilitasi pengimplementasian inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan anggaran pemerintah atau swadaya masyarakat, serta pembentukan mekanisme kolaborasi yang sesuai dengan keadaan setempat. Satu contoh kegiatan yang difasilitasi proyek dapat ditemukan di desa Maleo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Fasilitator masyarakat yang sudah dilatih proyek mengunjungi desa Maleo untuk mendorong diskusi antar masyarakat tentang isu pembangunan yang mereka hadapi. Hal ini lalu mengarah pada dialog dimana penduduk desa menyadari seriusnya permasalahan yang mereka hadapi, antara lain perembesan air laut ke sumur mereka serta erosi pada tepi laut. Hal ini pada akhirnya memicu kegiatan yang dipimpin oleh masyarakat setempat. Mereka memutuskan untuk menanam biji bakau. Pemerintah daerah yang kemudian mengenali inisiatif masyarakat tersebut, saat ini juga mendukung upaya tersebut. Hal ini menunjukkan: bagaimana fasilitasi terhadap desa yang dilakukan oleh fasilitator masyarakat yang sudah dilatih oleh proyek, akhirnya mengarah pada tindakan nyata terhadap pemecahan masalah.



Berdialog dengan penduduk setempat untuk memahami berbagai permasalahan yang mereka hadapi

IV. Pembangunan Jaringan Infrastruktur Tenaga Listrik dan Energi

Tinjauan Umum

Di sektor listrik, bantuan Pinjaman Jepang yang pertama ke Indonesia dimulai pada tahun 1968 yakni proyek pembangkit listrik tenaga air yang diwakili oleh proyek sungai Brantas di propinsi Jawa Timur. Sejak saat itu sampai sekarang, JICA telah banyak memberikan bantuan kerjasama di sektor listrik di Indonesia. Ketika Indonesia beralih ke era industrialisasi di tahun 1980-an, dimulailah secara aktif promosi pembangunan sektor listrik yang sangat penting bagi pertumbuhan industri sekunder. Indonesia mengajukan usulan dukungan ke pemerintah Jepang untuk mendukung industri pasokan listrik berdasarkan kebijakan ini, dan JICA merespon dengan memberikan dukungan secara komprehensif yang dimulai dari formulasi perencanaan pembangunan pembangkit listrik sampai dengan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan pembangkit listrik. Ketika situasi "permintaan dan persediaan" listrik diperketat di Indonesia yang disebabkan oleh terhentanya pembangunan pembangkit listrik sebagai dampak krisis mata uang Asia di tahun 1997, JICA membantu memperbaiki kondisi kritis di Indonesia dengan memberikan keputusan yang cepat dalam memberikan bantuan darurat pembangunan pembangkit listrik. Dalam beberapa tahun terakhir,

JICA telah membantu mempromosikan penggunaan energi non minyak bumi dan energi terbarukan, seiring dengan kebijakan Indonesia, dan telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan energi panas bumi. Kerjasama JICA di sektor listrik di Indonesia meliputi ruang lingkup yang cukup luas dari mulai pembuatan Rencana Induk sampai dengan pembangunan sumber daya manusia. Dan di bidang pembangunan kapasitas pembangunan atau perbaikan fasilitas pembangkit listrik, kontribusinya lebih dari seperempat fasilitas milik Negara (per tahun 2008).

Di lain pihak, sektor energi yang diwakili oleh bidang pembangunan minyak dan gas bumi, merupakan sumber devisa yang sangat penting dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi Indonesia.

Di bidang ini, JICA telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan Indonesia dengan mendukung pembangunan sumber daya minyak bumi dan gas alam di tahun 1970-an. Meskipun akhirnya pembangunan melalui sektor swasta menjadi kebijakan umum, JICA masih terlibat, seperti dalam pelaksanaan proyek "Pembangunan Jalur Pipa Gas Sumatera Selatan-Jawa Barat" dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan ini akan meningkatkan volume transportasi gas alam dari sumbernya di Sumatera ke pulau Jawa.

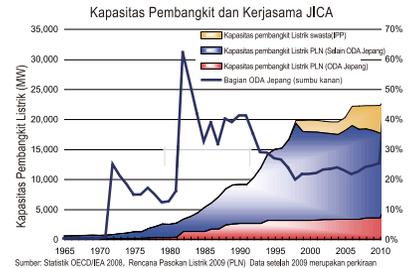
Hasil

Selama bertahun tahun, JICA telah memberikan bantuan yang cukup luas dimulai dari pembuatan Rencana Induk sampai pada pembangunan sumberdaya manusia bagi sektor listrik dan energi di Indonesia. Sebagai hasilnya:

- Pada tahun 2008, JICA telah memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik dan pembangunan industri dengan menopang lebih dari seperempat pembangunan aset milik Negara dan perbaikan fasilitas di bidang kapasitas pembangkit listrik.
- JICA mendukung pembangunan sumber daya energi di Indonesia sampai dengan tahun 1980-an yang pada akhirnya menjadikan sektor ini menjadi pendorong perekonomian Indonesia.
- JICA menekan pengaruh negatif pada pembangunan ekonomi dengan mendukung perbaikan pembangkit listrik di Jawa-Bali, yang merupakan daerah permintaan listrik terbesar di Indonesia, setelah krisis mata uang Asia di tahun 1997. Ini juga memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi yang stabil dengan membuat persiapan bagi perluasan permintaan kebutuhan listrik.



Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) panas bumi Lahendong



Dukungan Darurat untuk Peningkatan Tenaga Listrik di Jawa-Bali

Dukungan ini berbentuk proyek Pinjaman ODA yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi keterbatasan persediaan tenaga listrik dalam kaitannya dengan pemulihan permintaannya pasca krisis keuangan Asia. Beberapa dari target dukungan tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, pengembangan PLTGU Muara Tawar, rehabilitasi PLTGU Semarang, pengembangan PLTGU Tanjung Priok, dengan total kapasitas 1.800 MW. Proyek ini dimulai pada 2003, dan dijadwalkan untuk mulai beroperasi pada 2012. Dengan terhubunginya Jawa - Bali melalui jalur transmisi 500kV sejak 2006, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang penting terhadap stabilitas pasokan listrik untuk Jawa - Bali, yang merupakan daerah permintaan listrik terbesar di Indonesia.



Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar